

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
TERHADAP UMKM OLAHAN HASIL PERIKANAN  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

**Disusun dan diajukan oleh  
EVALETRINA GRACELITA MARISDA**

**L041 18 1021**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH**  
**TERHADAP UMKM OLAHAN HASIL PERIKANAN**  
**PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

**EVALETRINA GRACELITA MARISDA**

**L041 18 1021**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN**  
**FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Implementasi Kebijakan Pemerintah  
terhadap UMKM Olahan Hasil Perikanan  
pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar**

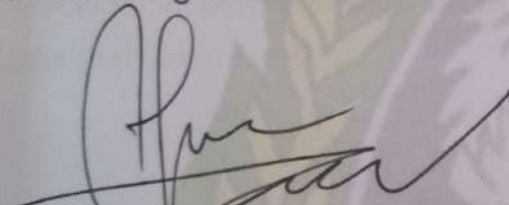
**Disusun dan diajukan oleh**

**EVALETRINA GRACELITA MARISDA**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Program Studi Program Sarjana Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Univeristas Hasanuddin pada tanggal 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

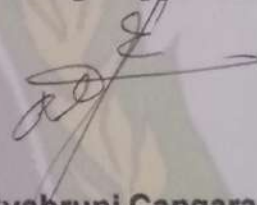
**Menyetujui:**

Pembimbing Utama



**Dr. Andi Adri Arie, S.Pi., M.Si**  
NIP. 19710422 200501 1 001

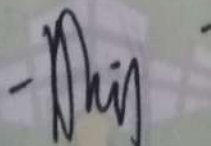
Pembimbing Anggota



**Arie Syahrani Cangara, S.Pi., M.Si**  
NIP. 19830113 201504 2 001

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi  
Agrobisnis Perikanan



**Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi., M.Si.**  
NIP. 19720926 200604 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evaletrina Gracelita Marisda  
NIM : L041 18 1021  
Program Studi : Agrobisnis Perikanan  
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

"Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM Olahan Hasil Perikanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar"

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 November 2022

atakan  
METERAI  
TEMPER  
685AKX112856344  
Evaletrina Gracelita Marisda



## ABSTRAK

**EVALETRINA GRACELITA MARISDA** L041181021. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM Olahan Hasil Perikanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar” dibimbing oleh **Andi Adri Arief** sebagai pembimbing utama dan **Arie Syahrani Cangara** sebagai pembimbing anggota.

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme implementasi kebijakan pemerintah terhadap UMKM olahan hasil perikanan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Makassar serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Agustus-September 2022 di Kota Makassar. Penentuan responden menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 15 responden. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan skala Likert. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme implementasi kebijakan pemerintah (BPUM) terhadap UMKM olahan hasil perikanan pada masa pandemi covid-19 di Kota Makassar belum optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak terlaksananya aspek monitoring dan evaluasi terhadap program kebijakan, yang berakibat pada penggunaan manfaat kebijakan yang tidak tepat sasaran. Adapun persepsi masyarakat terhadap sosialisasi kebijakan berada pada interval sangat baik dengan indeks skor 84%, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan berada pada interval baik dengan indeks skor 78% dan persepsi masyarakat terhadap manfaat kebijakan berada pada interval sangat baik dengan indeks skor 86,67%.

**Kata kunci** : Mekanisme, Implementasi, BPUM, UMKM, persepsi

## ABSTRACT

**EVALETRINA GRACELITA MARISDA** L041181021. "Implementation of Government Policies for Processed Fishery Product MSMEs during the Covid-19 Pandemic in Makassar City" supervised by **Andi Adri Arief** as the main supervisor and **Arie Syahrani Cangara** as member advisor.

---

---

This study aims to find out the mechanism for implementing government policies for MSMEs processed fishery products during the covid-19 pandemic in Makassar City and the public's perceptions of these policies. The research was conducted in August-September 2022 in the City of Makassar. Determination of respondents using Purposive Sampling technique with a total sample of 15 respondents. The data sources used are primary data and secondary data which were then analyzed using descriptive analysis and a Likert Scale. From the research results it is known that the government policy implementation mechanism (BPUM) for processed fisher product MSMEs during the covid-19 pandemic in the City of Makassar was not optimal. This is due to the non-implementation of monitoring and evaluation aspects of policy programs which result in the use of policy benefits that are not on target. Meanwhile, public perceptions of policy outreach are at very good intervals with an index score of 84%, public perceptions of policy implementation are at good intervals with an index score of 78% and public perceptions of the benefits of the policy are at very good intervals with an index score of 86,67%.

**Keywords:** Mechanism, implementation, BPUM, MSMEs, perception

## KATA PENGANTAR

*Salam sejahtera*

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM Olahan Hasil Perikanan pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar”** guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Marthius Baram** dan **Ibunda Ida Royani** yang menjadi alasan terbesar penulis mewujudkan segala cita-cita dan harapan. Juga kepada adik-adik tercinta **Cristianovaldi Verly Mawanda, Clairine Fausta Avigal** dan **Christa Graciela Elzira** yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam segala hal.

Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya penulis hantarkan kepada **Ibu Arie Syahrini Cangara, S. Pi, M. Si** selaku penasihat akademik, pembimbing yang telah menjadi pengganti orang tua yang selalu menasihati, memberi arahan serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan sarjana Strata 1 di Universitas Hasanuddin. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Dr. Andi Adri Arief, S.Pi. M. Si** selaku pembimbing utama yang setia memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Safruddin, S.Pi, M.Si.,Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2. **Ibu Prof. Dr. Ir. Siti Alamsyah, M.P** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Ahmad Faizal, S.T.,M.Si** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin

4. **Bapak Dr. Fahrul, S.Pi., M.Si** selaku Ketua Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
5. **Ibu Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi, M.Si** selaku Ketua Program Studi Agrobisnis Perikanan Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
6. **Bapak Dr. Abd. Wahid, S. Pi, M. Si & Bapak Benny Audy Jaya Gosari S.Kel., M.Si** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru dan masukan saran dan kritik yang sangat membangun.
7. **Dosen dan Staf Dosen** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
8. **Seluruh Staf Administrasi FIKP** yang selalu membantu dalam urusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan limpahan kasih sayang melalui skripsi ini penulis sampaikan kepada mereka yang telah berperan serta dalam proses penelitian, penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.

1. **Sahabat SILO18**, terima kasih atas kebersamaan, semangat dan perhatian tulus kalian untuk penulis selama menempuh pendidikan. Terkhusus juga kepada **A. Nadia Mughsitani, Siti Khaerunnisa, Apriani Padang, Fifi Angraeni** dan **Asriadi** yang membantu penulis menyempurnakan penulisan skripsi ini.
2. Teman-teman seperjuangan **KKN-106 Maros, Posko 3 Cenrana**.
3. Seluruh responden yang bersedia memberi keterangan dan informasi  
Ucapan terima kasih dan limpahan kasih sayang juga penulis sampaikan kepada mereka yang telah setia memberi dukungan dan perhatian kepada penulis melalui doa-doa:
  1. **Yengki, Angelina, Apriliyani, Yerindi, Kartini, dan Pdt. Patricia** yang setia memberi semangat dan dukungan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  2. **Rappe, Musdalifah, Fitriyani, Ismawati, Nurul Qarimah** dan **Eka Safitri** yang selalu menghibur dan memberikan semangat bagi penulis.

*Salam sejahtera*

Maros, 2022

EVALETRINA GRACELITA MARISDA



## BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Makassar, pada tanggal 14 Februari 2000. Penulis merupakan anak sulung dari pasangan Ayah Marthius Baram dan Ibu Ida Royani .

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Aba Kappang pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2006 Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 58 Kappang dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Maros pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 4 Maros pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin Program Studi Agrobisnis Perikanan melalui jalur SNMPTN.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) regular gelombang 106 tahun 2021 di Kecamatan Cenrana, Desa Labuaja. Praktik Kerja Profesi (PKP) di PT. Global Maju Pratama, Pattene Business Park Maros pada tahun 2021. Penulis juga melaksanakan penelitian di kota Makassar dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM Olahan Hasil Perikanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>ix</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian Impelementasi Kebijakan Pemerintah.....	5
B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	6
C. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM .....	7
D. Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM di Masa Pandemi Covid-19.....	9
E. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah .....	9
F. Persepsi Pelaku UMKM Olahan Perikanan terhadap Kebijakan Pemerintah ....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Kerangka Pikir .....	12
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
A. Waktu dan Tempat .....	14
B. Jenis Penelitian .....	14
C. Sampel dan Populasi.....	14
D. Sumber Data .....	15
E. Teknik Pengumpulan Data.....	16
F. Teknik Analisis Data .....	17
G. Definisi dan Batasan Operasional.....	18
<b>IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	20
B. Penduduk .....	22
C. Karakteristik Umum Responden .....	22
D. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Makassar ..	25
E. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah .....	28
F. Persepsi Pelaku UMKM Olahan Hasil Perikanan terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah.....	32

<b>V. PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Mekanisme Implementasi Kebijakan Pemerintah.....	39
B. Persepsi Pelaku UMKM Olahan Hasil Perikanan.....	42
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2. Jumlah UMKM Produk Olahan Perikanan Kota Makassar yang Menerima Manfaat Kebijakan.....	14
Tabel 3. Interval Skor Jawaban Likert .....	18
Tabel 4. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar .....	21
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar.....	22
Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur .....	23
Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	24
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Lama Usaha .....	24
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Usaha.....	25
Tabel 11. Pemenuhan Kriteria Calon Penerima Manfaat BPUM Kota Makassar .....	29
Tabel 12. Pemenuhan Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan BPUM .....	30
Tabel 13. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Sosialisasi Kebijakan BPUM .....	33
Tabel 14. Persepsi pelaku usaha terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPUM .....	35
Tabel 15. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Manfaat Kebijakan BPUM .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir .....	13
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.....	27
Gambar 3. Skema Pengusulan dan Penyaluran BPUM.....	28
Gambar 4. Diagram Distribusi Jawaban Respoden Terhadap Sosialisasi BPUM .....	33
Gambar 5. Diagram Distribusi Jawaban Respoden Terhadap Pelaksanaan BPUM.....	35
Gambar 6. Diagram Distribusi Jawaban Respoden Terhadap Manfaat BPUM .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Responden.....	52
Lampiran 2. Skor Jawaban Persepsi Pelaku Usaha Olahan Perikanan Terhadap Kebijakan BPUM .....	53
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian.....	55
Lampiran 4. Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan BPUM .....	57
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian .....	60

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> dari total luas wilayah Indonesia. Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang mencapai 7,3 juta ton/tahun (BPS, 2017). Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memiliki panjang garis pantai sekitar 2.500 km dengan potensi sumber daya perikanan tangkap yang besar dengan potensi berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi (Susaniati, 2011). Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan di Indonesia. pemerintah telah melakukan berbagai upaya demi menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Besarnya potensi sumber daya kelautan pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ternyata belum sepenuhnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para pengusaha perikanan. Sumber daya kelautan yang ada belum dapat dimaksimalkan dengan pengolahan perikanan yang baik. Belum adanya keterpaduan pengembangan perikanan karena masing-masing daerah mempunyai program tersendiri sehingga perlu memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan untuk memenuhi kebutuhannya (Wahdaniyah, 2018).

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki jumlah besar dan tersebar di seluruh tanah air merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mengembangkan kemampuan, ketangguhan serta ketahanan nasional secara keseluruhan (Qurratun, 2020). Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan. Usaha kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan baik usaha budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan, maupun pemasaran hasil perikanan termasuk juga koperasi memiliki peranan penting dan strategis dalam tatanan perekonomian daerah maupun nasional. Industri skala rumah tangga tersebut tidak hanya menghidupkan ekonomi daerah bahkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Hamdani dkk, 2020).

Di Indonesia, *Corona Virus Disease* (COVID-19) hingga saat ini masih terus meresahkan. Covid-19 adalah kasus pneumonia yang keberadaannya pertama kali diketahui di Wuhan, Provinsi Hubei. Tidak sampai satu bulan keberadaannya, penyakit ini telah menyebar ke berbagai provinsi di China dan terus menyebar ke berbagai negara lain di dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, dilaporkan bahwa telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi Covid-19 di China dan 86 kasus lain terkonfirmasi di negara lain seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33 kematian di seluruh dunia. Selanjutnya, negara-negara di Eropa dan Amerika Utara menjadi pusat tersebarnya Covid-19 (Susilo dkk, 2020).

Kasus Covid-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua jumlah kasus. Berdasarkan data per tanggal 31 Maret 2020, dapat diketahui bahwa terdapat 1.528 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia dan 136 diantaranya merupakan kasus kematian. Berdasarkan data tersebut pula diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat mortalitas tertinggi di Asia tenggara yakni sebesar 8,9 % (Sukur, dkk. 2020).

Terkait perkembangan Virus Corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran social distancing. Hal ini disebabkan karena pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari Covid-19 ini bersifat droplet percikan lender kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan (Yunus dan Rezki, 2020: 230). Seseorang yang sakit mengeluarkan virus pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker dan beraktivitas di rumah dengan tujuan untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan agar kemungkinan peluang akan tertularnya virus ini bisa menjadi rendah. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus tersebut.

Dampak wabah virus corona (Covid-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan dan pendidikan, virus ini bahkan mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Perekonomian global semakin melambat dan mempengaruhi dunia usaha termasuk UMKM. Data dari kementerian koperasi dan UMKM yang memaparkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Antara, 2020).

Besarnya dampak virus Corona terhadap UMKM mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai langkah pemberdayaan UMKM di masa pandemi yang selanjutnya akan mendorong pemulihan perekonomian negara. Adapun bentuk-bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, yakni: BPUM (Bantuan Pelaku Usaha Mikro).



Kota Makassar sebagai bagian dari negara Indonesia yang pelaku usaha di bidang perikanan terdampak pandemi turut serta sebagai penerima kebijakan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai “Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM Olahan Hasil Perikanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan pemerintah terhadap UMKM olahan hasil perikanan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Makassar?
2. Bagaimana persepsi pelaku UMKM olahan hasil perikanan Kota Makassar terhadap kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme implementasi kebijakan pemerintah terhadap UMKM olahan hasil perikanan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Makassar.
2. Mengetahui persepsi pelaku UMKM olahan perikanan Kota Makassar terhadap kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah terhadap UMKM olahan hasil perikanan pada masa pandemi Covid-19.

### **2. Bagi akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya bagi masyarakat yang belum mengetahui mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap UMKM olahan hasil perikanan pada masa pandemi Covid-19.

### 3. Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM Olahan Hasil Perikanan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

### 4. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam menentukan strategi pengembangan kebijakan terhadap para pelaku UMKM olahan hasil perikanan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut.

### 5. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman praktik di bidang penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap UMKM olahan hasil perikanan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pemerintah

Implementasi diartikan sebagai suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan terhadap suatu kebijakan dilakukan sebagai langkah penyempurnaan suatu program (Haerul dkk, 2016). Menurut Wahab (1997), istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2005). Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai: tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustiono, 2006). Berdasarkan definisi atau pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas dalam melaksanakan program-program yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjuk perilaku pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah pelaku dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Budi Winarno dalam Muhaddin (2020) implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Dwijowijoto (2004) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan bisa mencapai tujuan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, umumnya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif, keputusan tersebut menetapkan identitas masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menyusun, membangun atau mengatur proses pelaksanaannya. Implementasi kebijakaan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang (Sunarti, 2016).

Menurut Budi Winarno dalam Muhaddin (2020) implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Ada beberapa teori mengenai implementasi kebijakan, teori tersebut disebut sebagai teori George C. Edward, teori Merilee S. Grindle dan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier serta teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

George C. Edward berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel antara lain; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Merilee S. Grindle berpandangan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Sedangkan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier berpandangan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/Undang-undang dan variabel lingkungan. Sementara, teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn berpandangan bahwa ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi dan politik (Haerul dkk, 2016).

Jadi, implementasi kebijakan pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## **B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

UMKM diartikan sebagai usaha yang didirikan oleh masyarakat, baik berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan

terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang (Ika, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mengenai pemberdayaan UMKM, pengertian UMKM dijabarkan menjadi 3 pengertian.

### **1. Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu memiliki aset kurang dari 50 juta di luar tanah dan bangunan dan omset maksimal 300 juta per tahun, laba usaha 2,5 juta perbulan.

### **2. Usaha Kecil**

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu memiliki aset 50 sampai 500 juta dan omset 300 sampai dengan 500 juta.

### **3. Usaha Menengah**

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memenuhi kriteria usaha menengah dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu memiliki aset 500 juta sampai 10 M dan omset 2,5 M sampai dengan 50 M.

## **C. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM**

### **1. Coronavirus Desease 2019**

Coronavirus Desease 2019 (Covid-19), merupakan virus RNA strain tunggal positif. Covid-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini diperkirakan dari hewan umumnya kelelawar, dan bisa menular dari hewan ke manusia bahkan dari manusia ke manusia lainnya. Penularan antar manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh WHO (*World Health Organization*), Covid-19 merupakan virus dari subfamily *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan

Ordo *Nidovirales* yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat (Ashidiqie, 2020).

Seseorang dengan riwayat penyakit diabetes lebih rentan terserang virus seperti flu, termasuk virus Corona. Selain itu, orang dengan riwayat penyakit jantung, ginjal, lanjut usia, dan daya tahan tubuh yang lemah juga menjadi golongan-golongan orang-orang yang memiliki resiko tinggi tertular Covid-19. Juga El Zowalaty dan Jarhult, mengatakan system paru-paru manusia rentan terhadap infeksi karena berkaitan dengan anggota tubuh lain. Aktivitas mata, hidung, atau mulut dapat mempengaruhi tingkat kesehatan paru-paru. Kondisi ini berlaku pada semua orang berapapun usianya. Sebagai contoh udara kotor yang terhirup hidung atau terhisap oleh mulut akan berdampak pada paru-paru. Hal ini yang terjadi pada penyebaran virus Corona pada manusia. Mata, hidung dan mulut yang terkontaminasi virus ini mengakibatkan paru-paru menjadi tidak sehat sehingga mudah flu, batuk, dan sesak napas.

## **2. Dampak pandemi covid-19 terhadap UMKM**

Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian (lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Sejak itu, kebangkrutan telah menumpuk dan tingkat awal mulai runtuh. Misalnya, pada bulan Maret, aplikasi bisnis AS turun antara 40% hingga 75% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi bahkan lebih tajam dibandingkan selama Great Recession. UMKM menyediakan setiap dua dari tiga pekerjaan di wilayah OECD dan berkontribusi setengah dari PDB. Angka-angka ini menunjukkan potensi pengorbanan segmen besar ekonomi. Memang, data OECD menunjukkan bahwa UMKM terwakili secara berlebihan di sektor-sektor yang paling terkena dampak tindakan penguncian, yaitu pariwisata, layanan ritel dan profesional, dan konstruksi dan transportasi, di mana mereka menyumbang tiga perempat dari semua pekerjaan. Wabah ini telah mengungkapkan kerentanan tinggi dari banyak usaha kecil itu, yang kondisinya semakin lama semakin mengkhawatirkan. Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang antara lain:

1. Jumlah unit usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%)
2. Kontribusi pada jumlah tenaga kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%)

3. Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%)
4. Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar.

#### **D. Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM di Masa Pandemi Covid-19**

Krisis pandemi Covid-19 tidak dapat diserahkan penyelesaiannya begitu saja kepada UMKM. Artinya UMKM tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya hubungan yang sinergis dari berbagai pihak. Pemerintah dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi yang memiliki kewenangan dalam mengatur jalannya berbagai aspek dan sektor kehidupan di Indonesia wajib membantu UMKM agar mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 yang mencarut marutkan usahanya. Berbagai bantuan dalam bentuk kebijakan maupun secara langsung kepada UMKM harus sampai dan dirasakan manfaatnya oleh UMKM.

Pemerintah melalui Menteri KUKM merumuskan dua langkah kebijakan untuk menyelesaikan masalah UMKM melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Kebijakan-kebijakan tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah memprioritaskan sektor UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Adapun kedua kebijakan tersebut ialah BPUM (Bantuan Pelaku Usaha Mikro), adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang senilai Rp. 1.200.000,00- yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pengeluaran Negara dan tidak untuk dikembalikan kepada negara.

#### **E. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah**

##### **1. Mekanisme Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan**

Mekanisme adalah sebuah kata yang merupakan serapan dari Bahasa Yunani yaitu kata "*Mechane*" yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata "*Merchos*" yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Moenir (2013) menyatakan bahwa "Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal" (Amalia, 2013). Sehingga, disimpulkan bahwa mekanisme merupakan serangkaian alat kerja yang berkaitan dengan proses kerja dan saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Dalam kaitanya dengan mekanisme implementasi, Deputi penanggungjawab program menyusun materi sosialisasi pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara

langsung dan tidak langsung. Dalam hal penyampaian informasi secara langsung dilakukan dengan cara kunjungan ke daerah. Dalam penyampaian informasi secara tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan media, baik media tulis, elektronik maupun media sosial.

## **2. Mekanisme Pendaftaran Penerima Manfaat Kebijakan**

### **Mekanisme Pendaftaran Kebijakan BPUM :**

1. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dengan persyaratan:
  - a) Merupakan WNI
  - b) Memiliki Nomor Induk Kependudukan
  - c) Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya.
  - d) Bukan ASN, TNI, POLRI, pegawai BUMN atau BUMD.
2. Calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM.
3. Pembersihan data dan validasi data calon penerima manfaat BPUM.
4. Penetapan calon penerima BPUM
5. KPA mencairkan dana BPUM (Kementerian Koperasi dan UKM).

## **F. Persepsi Pelaku UMKM Olahan Perikanan terhadap Kebijakan Pemerintah**

Persepsi merupakan suatu proses yang diawali dengan penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud penerimaan stimulus oleh individu melalui alat reseptor-nya. Pakar psikologi, persepsi dapat didefinisikan sebagai berikut (Nisa, 2016):

1. Persepsi merupakan penafsiran yang terorganisir terhadap suatu stimulus serta mampu mempengaruhi sikap dan perilaku.
2. Persepsi adalah penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensori ke dalam perspektif obyek dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan perspektif itu untuk mengenali dunia.
3. Persepsi adalah proses individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan yang diterima oleh panca indera untuk memberi arti pada lingkungan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pandangan.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian di bawah ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan penelitian terdahulu yaitu untuk



memerhatikan persamaan dan perbedaan baik itu dalam hal metode, waktu serta tempat penelitian. Kajian penelitian terdahulu perlu dilakukan untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan penentuan metode dalam menganalisis data penelitian. Berikut ulasan penelitian terdahulu secara singkat:

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Rosalini Nisbullah (2022)	Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program BPUM di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya, ada hambatan yang ikut memengaruhi berjalannya program, yakni masih adanya masyarakat yang belum mengetahui adanya program BPUM, masih kurangnya kuantitas staf pelaksana, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses penyaluran dana bantuan.
2	Ima Nurmalasari, dkk (2022)	Implementasi Program Bantuan Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Sagulung Kota Batam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPUM dapat dikatakan efektif. Pihak terkait bisa melaksanakan sosialisasi dengan baik dan dinilai sudah menjalankan kewenangan sesuai peraturan yang ada, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran
3	Moch. Rozzaq (2021)	Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya	Hasil penelitian yang diperoleh di Kota Surabaya menunjukkan bahwa implementasi berjalan dengan baik, meskipun ada kendala dalam hal penyebaran informasi terkait program dikarenakan pandemi itu sendiri dan belum semua masyarakat Surabaya

			mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperoleh informasi seputar program yang berjalan.
4	Eva Roziah (2022)	Implementasi program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk Pengembangan Sektor UMKN di Masa Pandemi Studi di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prodrum BPUM di Kecamatan Dukun sudah berjalan dengan baik untuk meengembangkan UMKM di masa pandemi. Meskipun dalam penerapannya masih ada yang harus dibenahi agar sasaran program lebih tepat
5	Selaku Wali Putra (2021)	Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPUM belum efektif di Dinas KopUKM Kabupaten Bener Meriah, hal ini disebabkan oleh pembagian bantuan yang tidak merata dan belum tepat sasaran. Hal tersebut berkaitan erat dengan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas.
6	Ksatriawan Zaenuddin (2021)	Resiliensi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) berbasis Dusun di Kabupaten Bantaeng pada Masa Pandemi Covid-19	Bantuan dari pemerintah pusat yang tergolong dalam aspek "I have" terbukti memengaruhi resiliensi, dalam hal ini membantu menutupi sebagian kecil dari kerugian yang dialami oleh pelaku usaha

## H. Kerangka Pikir

Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

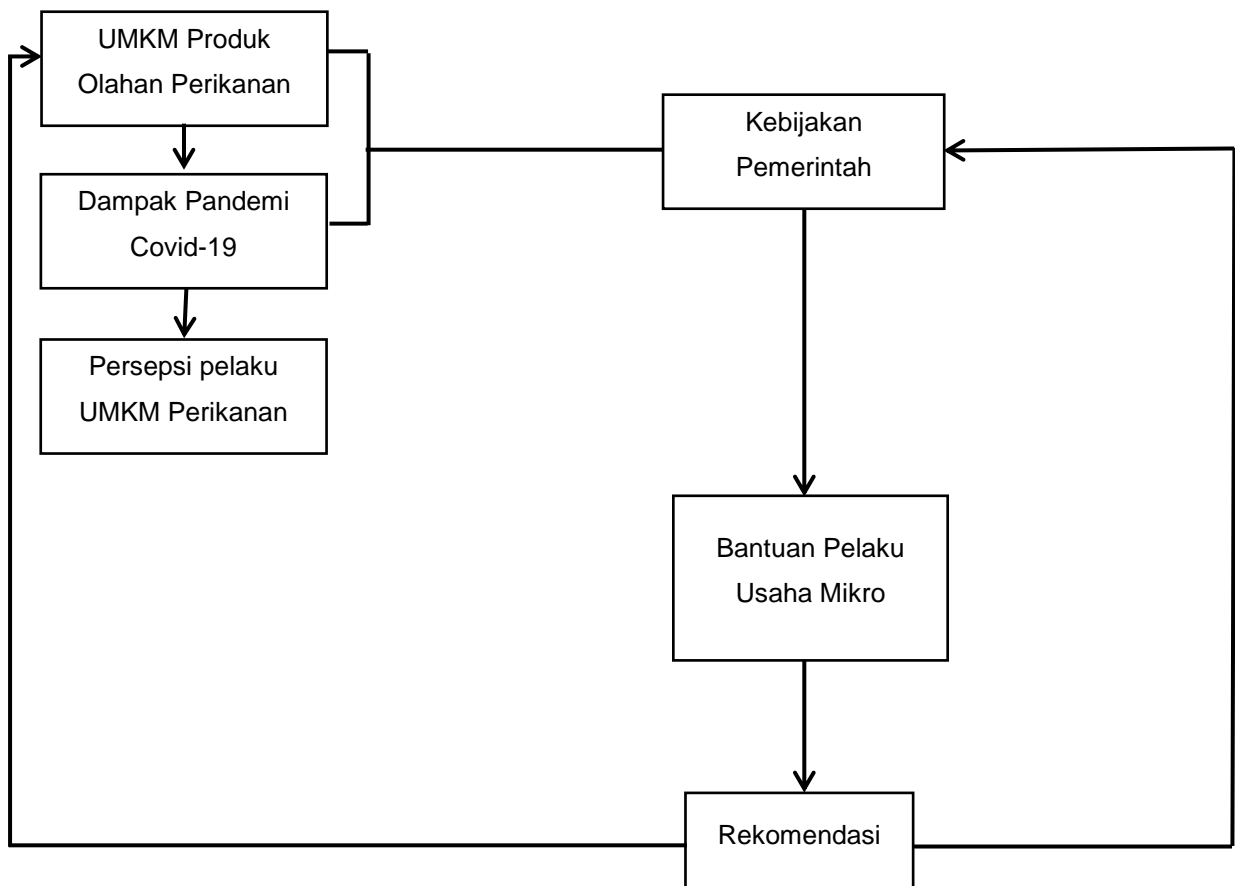
Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Langkah-langkah penguncian (lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan

dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia yang berakibat pada penurunan hingga penjualan yang mengakibatkan menurunnya pendapatan pada UMKM.

Krisis pandemi Covid-19 tidak dapat diserahkan penyelesaiannya begitu saja kepada UMKM. Artinya UMKM tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya hubungan yang sinergis dari berbagai pihak. Pemerintah dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi yang memiliki kewenangan dalam mengatur jalannya berbagai aspek dan sektor kehidupan di Indonesia wajib membantu UMKM agar mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 yang mencarut marutkan usahanya. Berbagai bantuan dalam bentuk kebijakan maupun secara langsung kepada UMKM harus sampai dan dirasakan manfaatnya oleh UMKM termasuk juga oleh UMKM olahan perikanan di Kota Makassar.

Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan pemerintah terhadap UMKM olahan hasil perikanan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

Secara skematik kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Berpikir